



Peran Muhammadiyah Dalam Advokasi Kebijakan Sosial Yang Adil di Indonesia

Ken Lyana Tantri P

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
tantriprameswari0@gmail.com

Abstrak

Peran strategis Muhammadiyah sebagai agen transformasi sosial dalam membentuk kebijakan sosial yang adil di Indonesia. Dengan mengkaji perjalanan historis, strategi dakwah, dan kontribusi multidimensional organisasi ini sejak awal abad ke-20, tulisan ini menunjukkan bagaimana Muhammadiyah tidak hanya menjadi kekuatan keagamaan, tetapi juga motor perubahan sosial yang konkret. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk mendeskripsikan berbagai inisiatif Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta respons terhadap isu-isu sosial kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan, dan hak asasi manusia. Temuan menunjukkan bahwa Muhammadiyah memainkan peran penting dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam progresif dengan tantangan modernitas, menjadikannya aktor utama dalam membentuk arah kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

Kata-kata kunci : Muhammadiyah, kebijakan sosial, transformasi

Abstract

The strategic role of Muhammadiyah as an agent of social transformation in shaping a fair social policy in Indonesia. By examining the historical journey, da'wah strategy, and multidimensional contribution of this organization since the early 20th century, this article shows how Muhammadiyah is not only a religious force, but also a motor for concrete social change. This research uses a qualitative approach through literature studies to describe various Muhammadiyah initiatives in the fields of education, economy, health, and responses to contemporary social issues such as poverty, inequality, and human rights. The findings show that Muhammadiyah plays an important role in aligning progressive Islamic values with the challenge of modernity, making it the main actor in shaping a more inclusive and fair public policy direction in Indonesia.

Keywords: Muhammadiyah, social policy, transformation.

Pendahuluan

Keadilan sosial merupakan nilai esensial dalam pembangunan bangsa Indonesia. Semangat kemerdekaan yang diperjuangkan sejak awal abad ke-20 tidak hanya bertujuan mengakhiri kolonialisme, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan yang merata. Namun, realitas sosial-politik Indonesia menunjukkan bahwa negara tidak dapat menjalankan tanggung jawab sosial secara tunggal. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil, khususnya yang berbasis keislaman, memainkan peran signifikan dalam menjembatani kepentingan negara dan masyarakat akar rumput.

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam modern yang lahir pada awal abad ke-20, telah membuktikan diri sebagai entitas yang tidak hanya religius, tetapi juga progresif dan responsif terhadap dinamika sosial. Berawal dari kritik KH Ahmad Dahlan terhadap praktik keagamaan yang stagnan dan tidak kontekstual, Muhammadiyah muncul dengan gagasan purifikasi ajaran Islam serta penguatan rasionalitas dalam beragama. Gerakan ini kemudian

berkembang menjadi agen perubahan sosial yang aktif dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan advokasi kebijakan sosial yang inklusif.

Dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan sains modern, Muhammadiyah berusaha menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar spiritualitas. Organisasi ini tidak hanya membangun institusi formal seperti sekolah dan rumah sakit, tetapi juga menginisiasi gerakan sosial berbasis nilai filantropi dan keadilan. Melalui intervensi sosial yang sistematis dan berkelanjutan, Muhammadiyah menjadi aktor penting dalam membentuk arah kebijakan sosial yang lebih adil dan partisipatif di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari literatur ilmiah, dokumen resmi Muhammadiyah, jurnal akademik, dan artikel yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis, dengan menitikberatkan pada dinamika pemikiran dan praktik sosial Muhammadiyah dalam konteks pembangunan sosial dan kebijakan publik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Konteks Historis Lahirnya Muhammadiyah: Transformasi dari Gerakan Keagamaan ke Sosial

Kelahiran Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah kolonialisme Belanda dan stagnasi pemikiran keislaman pada awal abad ke-20. Pada masa itu, umat Islam Indonesia mengalami keterbelakangan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap struktur kekuasaan. KH Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, menilai bahwa salah satu penyebab utama stagnasi umat adalah tidak adaptifnya umat Islam terhadap perubahan zaman. Ia mengusulkan pentingnya pembaruan dalam pemahaman dan praktik Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, namun dengan pendekatan rasional dan modern.

Dengan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, KH Ahmad Dahlan merintis suatu bentuk gerakan Islam yang tidak hanya menitikberatkan pada ibadah ritual, tetapi juga pada aspek sosial kemasyarakatan. Gerakan ini membawa semangat purifikasi dan revitalisasi agama Islam agar kembali pada ajaran yang otentik sekaligus relevan dengan realitas sosial. Pembaruan ini mencakup pendidikan modern, pelayanan kesehatan, advokasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat sebagai instrumen dakwah yang kontekstual.

Di tengah tekanan kolonialisme dan marginalisasi politik, Muhammadiyah memilih jalur non-politik namun sangat politis dalam makna praksis sosial. Dengan menolak doktrin fatalisme yang mengakar kuat di kalangan umat, Muhammadiyah memperkenalkan semangat etos kerja, tanggung jawab sosial, dan keberanian berpikir kritis. Melalui jaringan sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit, organisasi ini membentuk kultur sosial baru yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, kebersihan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi sebagai bagian dari keimanan.

2. Muhammadiyah dan Pendidikan: Pilar Emansipasi Sosial

Sejak awal, pendidikan menjadi instrumen utama Muhammadiyah dalam upaya mencerdaskan umat. KH Ahmad Dahlan mengembangkan konsep pendidikan yang

memadukan ilmu agama dan pengetahuan umum, yang saat itu belum banyak diterapkan oleh lembaga Islam lainnya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi pelopor pendidikan Islam modern yang menggabungkan pelajaran akidah dengan matematika, ilmu alam, dan bahasa asing.

Menurut data terbaru, Muhammadiyah mengelola lebih dari 6.000 satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan lainnya. Kurikulum yang diterapkan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang bertujuan menciptakan peserta didik yang berintegritas, cakap, dan peduli pada masyarakat.

Pendidikan di Muhammadiyah tidak berhenti di kelas. Organisasi ini juga membangun budaya literasi melalui penerbitan buku, jurnal, dan media dakwah. Melalui Majelis Pendidikan, Muhammadiyah juga aktif dalam reformasi sistem pendidikan nasional dengan menawarkan model pendidikan Islam berbasis nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal ini menjadi pembeda Muhammadiyah dibandingkan dengan organisasi keagamaan lainnya, karena mampu mentransformasikan pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial dan pembebasan struktural.

3. Muhammadiyah dalam Advokasi Sosial dan Keadilan Ekonomi

Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan yang membela kelompok rentan melalui pendekatan advokasi sosial berbasis nilai Islam. Program-program seperti kompetisi sosial, beasiswa dhuafa, pelatihan ekonomi produktif, hingga pendirian koperasi syariah merupakan contoh nyata bagaimana organisasi ini menjalankan misi sosialnya. Muhammadiyah melihat zakat, infak, dan wakaf bukan hanya sebagai amal ibadah personal, tetapi sebagai alat distribusi kesejahteraan dan keadilan sosial.

Program pemberdayaan ekonomi, terutama bagi komunitas miskin, dilakukan dengan membangun koperasi mikro, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan modal usaha berbasis wakaf produktif. Model ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang adil. Pendekatan ini disebut sebagai “ekonomi berbasis nilai” yang menjadi karakteristik utama Muhammadiyah, yang tidak menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama, melainkan keberkahan dan kemaslahatan bersama.

Muhammadiyah juga aktif dalam pengembangan kebijakan sosial berbasis masyarakat. Dalam merespons ketimpangan sosial yang struktural, Muhammadiyah tidak hanya memberikan bantuan karitatif, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan publik melalui dialog dan partisipasi dalam forum legislasi. Peran Muhammadiyah dalam advokasi RUU Perlindungan Anak, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta kebijakan pendidikan inklusif menunjukkan peran strategisnya dalam ruang kebijakan.

4. Kesehatan dan Penanggulangan Krisis Sosial

Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah telah mendirikan lebih dari 100 rumah sakit dan klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Rumah sakit ini tidak hanya melayani pasien Muslim, tetapi juga masyarakat umum tanpa diskriminasi. Layanan kesehatan Muhammadiyah mengintegrasikan aspek medis modern dengan nilai-nilai keislaman, seperti pendekatan holistik terhadap penyembuhan dan pelayanan berbasis kasih sayang.

Selama pandemi COVID-19, Muhammadiyah termasuk organisasi keagamaan pertama yang membentuk gugus tugas khusus, yaitu Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC). Lembaga ini tidak hanya menyosialisasikan protokol kesehatan, tetapi juga menggalang dana, mendistribusikan alat pelindung diri (APD), menyediakan rumah sakit rujukan, dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Strategi tanggap darurat Muhammadiyah juga diterapkan dalam bencana alam, seperti gempa di Lombok dan Palu, serta banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah bekerja secara sistematis dengan prinsip manajemen risiko dan penguatan komunitas berbasis lokal. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga memiliki kapasitas mitigasi dan manajemen berkelanjutan.

5. Peran Strategis di Era Reformasi dan Demokratisasi

Memasuki era reformasi, Muhammadiyah mengalami reposisi sebagai kekuatan moral yang kritis terhadap kebijakan negara. Tidak hanya melalui pernyataan sikap, Muhammadiyah juga membangun jaringan advokasi yang melibatkan lembaga internal seperti Majelis Hukum dan HAM, serta Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Isu-isu seperti anti-korupsi, kebebasan beragama, pengawasan pemilu, hingga perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian dari agenda sosial-politik Muhammadiyah.

Sebagai aktor civil society, Muhammadiyah menolak untuk menjadi partai politik, namun tetap berperan aktif dalam mendidik warga agar menjadi pemilih yang rasional dan kritis. Melalui penguatan literasi hukum dan pendidikan politik berbasis etika Islam, Muhammadiyah memberikan kontribusi dalam membangun demokrasi yang bermartabat.

6. Ekonomi Islam dan Kemandirian Umat

Salah satu agenda penting Muhammadiyah di abad ke-21 adalah membangun kemandirian ekonomi umat. Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Muhammadiyah memosisikan gerakan ekonomi sebagai bentuk dakwah yang berorientasi pada keadilan distribusi dan partisipasi kolektif. Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) telah dikembangkan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, jasa travel haji-umrah, kuliner halal, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis wakaf.

Pendekatan ekonomi Muhammadiyah bersifat partisipatif, di mana anggota dan simpatisan dilibatkan sebagai pelaku aktif, bukan hanya konsumen. Universitas Muhammadiyah didorong menjadi inkubator bisnis dan pusat riset ekonomi Islam. Model sinergi antara akademisi, praktisi, dan pengelola zakat/wakaf ini menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

Simpulan

Muhammadiyah merupakan aktor penting dalam lanskap sosial keagamaan Indonesia yang mampu beradaptasi dengan kompleksitas zaman. Melalui pendekatan integratif antara nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan kerja sosial, Muhammadiyah telah membuktikan kapasitasnya dalam membentuk kebijakan sosial yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Peran aktif Muhammadiyah dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan advokasi sosial menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa. Di tengah tantangan modernitas dan ketimpangan struktural, Muhammadiyah tetap relevan sebagai motor perubahan yang mendorong keadilan sosial di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Abdullah Masmuh. (2020). Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Peradaban Di Dunia. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 15(1), 78–93. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v15i1.107>
- Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju. (2024). Sejarah dan Peran Muhammadiyah untuk Kemajuan Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 124–134. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.442>
- Firas, M. F., Salleh, K., Fariza, W., & Wan, A. (2024). Muhammadiyah dan Peranannya dalam Menegakkan Keadilan Sosial di Indonesia [Muhammadiyah and It ' s Role In Upholding Social Justice In Indonesia] Muhammadiyah dan Peranannya dalam Menegakkan Keadilan Sosial di Indonesia [Muhammadiyah and It ' s Role In Upholding Social Justice In Indonesia]. December. <https://doi.org/10.33102/uij.vol36no03.608>
- Nurhayati, R., Islamiah, N., & Amin, A. (2023). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial Dan Ekonomi (Studi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai). *Journal of Islamic Education and Social Science*, 23–35. <http://jurnal.upmk.ac.id/index.php/JIESS/article/view/2968>